

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku dan Jurnal

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- AlfanMiko(ed), *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Arie Sukanti dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Arie Sukanti Hutagalung, "Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional*, Djembatan, Jakarta, 1994.
- B.F.Sihombing, *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Pustaka Mizan, Bandung, 1997.
- Djoni Sumardi Gozali, *Hukum Pengadaan Tanah di Indoensia (Pengaturan dan Prosedur Serta Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>., diakses pada 10 April 2017.

Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

H. Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2004.

J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1999.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.

Julius Sembiring dan Rakhmat Riyadi, *Tanah Adat Sebagai Obyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Amongkarta, Yogyakarta, 2019.

Kurnia Warman dan Syofiarti, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat vs Pemerintah)*, Artikel Penelitian Strategis Nasional Dikti Tahap II, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010.

Maria SW Sumardjono, *Tanah Dalam Persepektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, KompasMedia Nusantara, Jakarta, 2008.

_____, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*, UGM Press, Yogyakarta, 2015.

Munir Fuady, *Konsep hukum Perdata cetakan pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.

Oloan Sitorus, *Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Prosiding Seminar Nasional*, Amongkarta, Yogyakarta, 2017.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

_____, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

Samodra Wibawa, *Beberapa Konsep Untuk Administrasi Negara*, Liberti, Yogyakarta, 1992.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis dalam Perspektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Sukmo Pinuji, *Tanah Adat dan Pengadaan Tanah*, Amongkarta, Yogyakarta, 2019.

Titin Fatimah dan Hengki Andora, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Tjahjo Widiyanto, *Kerikil-kerikil Seputar Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Pengadaan Tanah, Hotel Puncak Raya-Bogor, 2005.

Tody Sasmitha, dkk., *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/2012; dan Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), 2019.

Wahyu Prawesthi dan Nur Handayati, *Analisis Yuridis Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya, STPN dan Pusat Studi Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2017.

Waskito, dkk., *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2018.

Y. Wartaya Winangun, SJ, *Tanah Sumber Nilai Hidup*, Cetakan 1, Kanisius, Yogyakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

C. Surat kabar/ Website

Harian Singgalang, *Pembebasan Lahan Sudah 97 Persen*, 17 Desember 2019.

Website Alinea.id: *Konflik Agraria Akibat Pembangunan Infrastruktur*
<http://www.alinea.id>

Website Bisnis.com: *Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin:Warga Ingin Kejelasan Soal Harga*, <http://www.bisnis.com>

Website Bisnis.com : *Tol Padang-Pekanbaru Terhambat Pembebasan Lahan*,
<http://www.bisnis.com>

Website CNBC Indonesia;*Sederet Bukti Konkret Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi!*<http://www.cnbcindonesia.com>